

**KINERJA PEGAWAI DIBAGIAN TATA USAHA DITENGAH
PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA KANTOR BPPRD PROVINSI SUMATERA UTARA)**

LAPORAN KKL

Oleh :

MUHAMMAD TAUFIQ

NPM. 178510057



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

**KINERJA PEGAWAI DIBAGIAN TATA USAHA DITENGAH
PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA KANTOR BPPRD PROVINSI SUMATERA UTARA)**

LAPORAN KKL

Oleh :

MUHAMMAD TAUFIQ

NPM. 178510057



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini saya buat dengan sejujurnya dan telah diterima oleh program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Judul laporan KKL : KINERJA PEGAWAI DIBAGIAN TATA USAHA
DITENGAH PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA
KANTOR BPPRD PROVINSI SUMATRA UTARA)

Nama : MUHAMMAD TAUFIQ

NPM : 1785210057

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Fakultas : ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Mengesahkan :

Medan, 14 Agustus 2020

Mahasiswa Pelaksana KKL



(Muhammad Taufiq)

Dosen Pembimbing Lapangan



(Evi Yunita Kurniaty S.Sos. M.IP)

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



(Evi Yunita Kurniaty S.Sos.M.IP)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan **LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)**.

Penulis sadar, sebagai seorang mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran, masih banyak hal yang harus saya pelajari. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penulisan laporan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Harapan penulis, semoga laporan sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu penulis dikemudian hari nanti bagi saya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga ALLAH S.W.T selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

MEDAN, 14 AGUSTUS 2020

Penulis



Muhammad Taufiq

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Dan Manfaat KKL	2
1.3 Alasan Pemilihan Lokasi KKL.....	4
BAB II.....	5
KAJIAN TEORI	5
2.1 Konsep Kinerja Pegawai	5
2.2 Teori Kinerja	5
2.3 Visi dan Misi	7
BAB III	8
DESKRIPSI LOKASI KKL.....	8
3.1 Sejarah Lokasi KKL.....	8
3.2 Prosedur Kerja.....	10
3.3 Struktur Organisasi.....	12
3.4 Lokasi Kuliah Kerja Lapangan.....	14
BAB IV	15
PEMBAHASAN	15
4.1 Kinerja Pegawai Di Tengah Pandemi Covid-19	15
4.2 Jenis-jenis Pelaksanaan KKL	18
4.3 Kegiatan Selama KKL.....	20
UNIVERSITAS MEDAN AREA	
4.4 Analisis Pelaksanaan Kegiatan KKL	21

BAB V.....	22
PENUTUP.....	22
5.1 Kesimpulan.....	22
5.2 Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA	24

LAMPIRAN :

1. Daftar Nilai KKL
2. Absensi KKL
3. Dokumentasi
4. Laporan Catatan Kegiatan Harian
5. Surat Keterangan Selesai KKL dari Instansi Yang Bersangkutan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia kerja saat ini sangat menuntut sumber daya manusia yang kompeten dan terampil dibidangnya masing-masing. Semua aspek-aspek kehidupan terus di tuntut untuk dapat menyesuaikan diri dan kopetensi serta kemampuan agar dapat mengikuti dan mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian pula pasar kerja membutuhkan kemampuan hard skill dan soft skill. Hal ini mendorong para mahasiswa mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang kompeten dan dibutuhkan di dunia kerja.

Dunia kerja pada saat ini memerlukan calon-calon tenaga kerja yang berkualitas dan profesional pada bidang yang diketahui. Oleh karena itu, salah satu hal yang menjadi tantangan utama bagi lulusan-lulusan Universitas Medan Area (UMA) yang berbasis skill dan kemampuan kerja yang tinggi adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum memasuki dunia kerja.

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah mata kuliah yang mengajarkan mengenai bagaimana praktek lapangan yang dilakukan dalam oraganisasi/instansi pemerintah agar mahasiswa mengenal keadaan perusahaan/instansi pemerintah dan aktifitasnya.

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Lapangan dimana ruang lingkup tidak bertumpuh pada aktifitas kerja tetapi juga menyangkut berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diambil dengan tetap memperhatikan prosedur dan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Dilakukan agar mahasiswa mendapat wawasan lebih luas mengenai dunia kerja, bisnis, kerja sama, motivasi, sikap, sifat dan prilaku yang baik dalam dunia kerja.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area (UMA) merupakan lembaga pendidikan yang profesional yang bertujuan menciptakan dan menempah sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga kerja ahli dan cekatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Medan Area (UMA) membekali mahasiswanya dengan keterampilan yang didukung dengan perpaduan teori dan praktek yang cukup, serta disiplin yang tinggi, sehingga dapat berkembang menjadi tenaga kerja yang potensial. Hal ini bukan hanya merupakan pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan saja, melainkan juga para mahasiswa mengenal dunia kerja yang sesungguhnya.

Dalam melaksanakan praktek Kuliah Kerja Lapangan ini penulis memilih kantor **BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UPT PPD MEDAN UTARA** yaitu sebuah instansi pemerintahan yang salah satu urusannya adalah tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk wilayah Sumatera Utara bagian Medan Utara yang berkomitmen untuk memenuhi pajak kendaraan bermotor. Penulis memilih tempat KKL dikantor **BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UPT PPD MEDAN UTARA** karena penulis ingin mengetahui cara kerja yang terdapat pada **BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UPT PPD MEDAN UTARA** sama dengan pembelajaran di perkuliahan.

1.2 Tujuan Dan Manfaat KKL

1. Tujuan KKL

Adapun tujuan khusus pelaksanaan program Kuliah Kerja Lapangan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Membina dan mempersiapkan ilmu pengetahuan mental dan etika bekerja serta menyesuaikan diri dalam menghadapi dan mengenal dunia kerja sesungguhnya hingga nantinya dapat dengan cepat menyesuaikan diri pada saat terjun ke dunia kerja atau dunia usaha.
- b. Memperluas wawasan terhadap pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diperoleh dibangku perkuliahan.
- c. Menguji dan mengukur kemampuan mahasiswa dalam menghadapi situasi kerja.
- d. Untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan dalam menyimpan dokumen instansi dan meningkatkan pengenalan pada aspek-aspek usaha yang potensial dalam lapangan kerja.

- e. Meningkatkan kualitas hard skill dan soft skill serta mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja dalam usaha tempat KKL dan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam upaya penulisan laporan KKL.

2. Manfaat KKL

a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja dan berinteraksi dalam Instansi dengan cara mengamati, mengenal dan menganalisa permasalahan yang dijumpai pada Instansi tempat KKL.
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja.
- 3) Membuat penulis merasa termotivasi dalam dunia kerja.
- 4) Memperoleh peluang untuk dapat kerja di perusahaan atau instansi tempat KKL setelah memperoleh ijazah S-1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- 1) Sebagai salah satu upaya mempromosikan tenaga kerja profesional lulusan perguruan tinggi swasta khususnya Universitas Medan Area.
- 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area memperoleh informasi pengetahuan dan kebutuhan kerja serta tentang pemanfaatan Ilmu pengetahuan dan kebutuhan kerja yang dapat disesuaikan dengan kurikulum.

c. Bagi Perusahaan/Instansi

- 1) Dengan adanya KKL di perusahaan/instansi tersebut akan dapat mengetahui langsung bagaimana kualitas lulusan Universitas Medan Area yang sebenarnya.
- 2) Membantu kegiatan operasional perusahaan/instansi terkait.
- 3) Pihak perusahaan dapat melatih mahasiswa agar lebih disiplin, tepat waktu serta bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
- 4) Melatih mahasiswa untuk dapat melakukan aktifitas yang rutin dilakukan oleh semua pihak perusahaan/instansi.
- 5) Melihat kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan dokumen.
- 6) Melatih mahasiswa untuk bekerja sama dalam tim.

1.3 Alasan Pemilihan Lokasi KKL

Kuliah Kerja Lapangan memiliki dampak positif bagi mahasiswa dan Perusahaan atau Instansi, karena kedua belah pihak memperoleh masukan-masukan sebagai nilai tambah dan selain itu mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di peroleh dalam perkuliahan serta meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Perusahaan atau Instansi. Adapun alasan saya memilih Kuliah Kerja Lapangan adalah :

1. Saya dapat merasakan langsung bekerja pada suatu Perusahaan atau Instansi.
2. Untuk memperoleh pengalaman kerja di Perusahaan atau Instansi.
3. Untuk mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya dalam suatu Perusahaan atau Instansi.
4. Untuk mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di Perusahaan atau Instansi, proses kerja yang dimaksud adalah bagaimana cara bekerja, kedisiplinan dan keselamatan dalam bekerja.
5. Membandingkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaan magang di Perusahaan atau Instansi.
6. Untuk memperoleh pengetahuan dari tempat KKL.
7. Mengaplikasikan kemampuan praktek yang diperoleh diperkuliahan ke dunia kerja Perusahaan atau Instansi.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Kinerja Pegawai

Sesuai dengan motto SAMSAT Putri Hijau Medan yaitu “Profesional Kerjaku dan Kepuasan Masyarakat Tujuanaku” maka konsep kinerja yang dilakukan SAMSAT Putri Hijau yaitu meningkatkan pelayanan yang cepat, tanggap dan akurat. Dalam pengurusan pajak kendaraan SAMSAT Putri Hijau Medan memberikan waktu yang efisien yaitu hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk pengurusan pajak. Pelayanan maksimal lain untuk wajib pajak yang sedang menunggu dalam pengurusan pajak yaitu adanya wifi gratis sehingga wajib pajak dapat mengisi waktu sambil berinternet. Wajib pajak juga dapat mengurus pajak kendaraan di SAMSAT Corner Plaza Medan Fair, SAMSAT Drive Thru keliling, serta SAMSAT Bus keliling. SAMSAT Corner Plaza Medan Fair berada di lantai 3 unit 63, JL. Gatot Subroto yang setiap harinya buka kecuali libur Nasional mulai pukul 10:00-21:00 WIB, untuk SAMSAT Drive Thru keliling berada di JL. S.Parman Ujung (Tugu Guru Patimpus) pada hari senin, kamis, dan jum’at, sedangkan untuk hari selasa dan rabu dilapangan Merdeka. Pada SAMSAT Bus keliling Putri Hijau Medan yaitu hari senin di pasar 1 Marelan, selasa di depan Bank BRI Belawan, rabu dilapangan Pertamina Amparan Perak, kamis di terminal tunggal, jum’at di Percut Sei Tuan, sabtu di lapangan dekat swalayan Irian Tembung. Apabila Masyarakat memerlupakan bantuan dalam pengurusan pajak maka SAMSAT Putri Hijau Medan telah menyediakan unit pengaduan.

2.2 Teori Kinerja

Teori Kinerja pegawai merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu. Menurut Robbins (2003) bahwa kinerja pegawai adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Dalam studi manajemen kinerja pekerja atau pegawai ada hal yang memerlukan pertimbangan yang penting sebab kinerja individual seorang pegawai dalam organisasi merupakan bagian dari kinerja organisasi, dan dapat menentukan kinerja dari organisasi tersebut. Sebaliknya, jika kinerja pegawai tidak baik maka kinerja organisasi akan dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari pegawai secara individu maupun kelompok.

Kinerja (performance) merupakan perilaku organisasional yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Kinerja seringkali difikirkan sebagai pencapaian tugas, dimana istilah tugas sendiri berasal dari pemikiran aktivitas yang dibutuhkan oleh pekerja (Gibson, 1997). Yukl (1998) memakai istilah proficiency yang mengandung arti yang lebih luas. Kinerja mencakup segi usaha, loyalitas, potensi, kepemimpinan, dan moral kerja. Profisiensi dilihat dari tiga segi, yaitu: perilaku-perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam bekerja, hasil nyata atau outcomes yang dicapai pekerja, dan penilaian-penilaian pada faktor-faktor seperti motivasi, komitmen, inisiatif, potensi kepemimpinan dan moral kerja. Gibson (1997) mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti, kualitas, efisiensi, dan kriteria efektifitas lainnya. Kinerja merefleksikan seberapa baik dan seberapa tepat seorang individu memenuhi permintaan pekerjaan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, kinerja dipandang sebagai hasil yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh organisasi dipengaruhi oleh tingkat kinerja pegawai secara individu maupun kelompok, dimana kinerja diukur dengan instrumen yang dikembangkan dalam studi yang tergantung dengan ukuran kinerja secara umum, kemudian diterjemahkan kedalam penilaian perilaku secara mendasar yang dapat meliputi berbagai hal yaitu: kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, pendapat atau pernyataan yang disampaikan, keputusan yang diambil dalam melakukan pekerjaan dan deskripsi pekerjaan. Dalam hal ini, dapat diketahui perbandingan teori kinerja pegawai pada saat melaksanakan KKL yaitu pada saat melaksanakan kkl saya melihat setiap pegawai harus memiliki kualitas pelayanan dan loyalitas saat melayani masyarakat yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan dan pegawai juga harus memiliki perilaku baik kepada masyarakat yang sedang melakukan pembayaran agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang ada di kantor pengelolaan pajak dan retribusi daerah medan utara.

Kinerja usaha terkini ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan Visi dan Misi SAMSAT Putri Hijau

2.3 Visi dan Misi

A.Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun visi dan misi badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota medan adalah untuk menjadi sebuah komitmen departemen.

a. Visi

“ mewujudkan masyarakat kota medan taat pajak dan retribusi “

b.Misi

1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah kota medan.
2. Memberdayakan SDM pegawai badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota medan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
4. Mengintensifkan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja pengelola PAD lainnya.
6. Mencari terobosan dalam menggali sumber-sumber PAD yang baru di luar PAD yang sudah ada.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI KKL



3.1 Sejarah Lokasi KKL

A. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pada mulanya urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah nomenklatur menjadi Direktorat Keuangan. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktoriat Keuangan. Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 7 november 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang "Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia", Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Semula Pembentukannya dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976). Sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai Institusi teknis, yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu (medebewind). Salah satu dinas tersebut adalah **DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (DISPENDAPROVSU)**. Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuk UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas). Sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara memiliki peranan yang sangat strategis yakni sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien, dan efektif. Dengan peran yang strategis ini, Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk :

1. Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Jasa Ketatausahaan.
2. Mampu mewujudkan pelayanan prima (excellent service) dalam pelaksanaan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi.
3. Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pajak.
4. Mampu mengoptimalkan kewenangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diberikan.

Sebagai upaya mengantisipasi luasnya wilayah pengelolaan, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah membentuk UPTD-UPTD yang kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan pemekaran, sehingga sampai saat ini telah dibentuk 32 (tiga puluh dua) Unit Pelaksanaan Tugas Dinas, yakni :

1. UPTD MEDAN UTARA : wilayah kerja Kota Medan.
2. UPTD MEDAN SELATAN : wilayah kerja sebagian Kabupaten Deli Serdang.
3. UPTD BINJAI : wilayah kerja Kota Binjai dan sebagian Kabupaten Deli Serdang, Hamperan Perak, dan Sunggal.
4. UPTD PANGKALAN BRANDAN : wilayah kerja sebagian Kabupaten Langkat.
5. UPTD STABAT : wilayah kerja sebagian Kabupaten Langkat.
6. UPTD LUBUK PAKAM : wilayah kerja sebagian Kabupaten Deli Serdang.
7. UPTD SELREMPAH : wilayah kerja sebagian Serdang Bedagai.
8. UPTD TEBING TINGGI : wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan sebagian Kabupaten Serdang Bedagai.

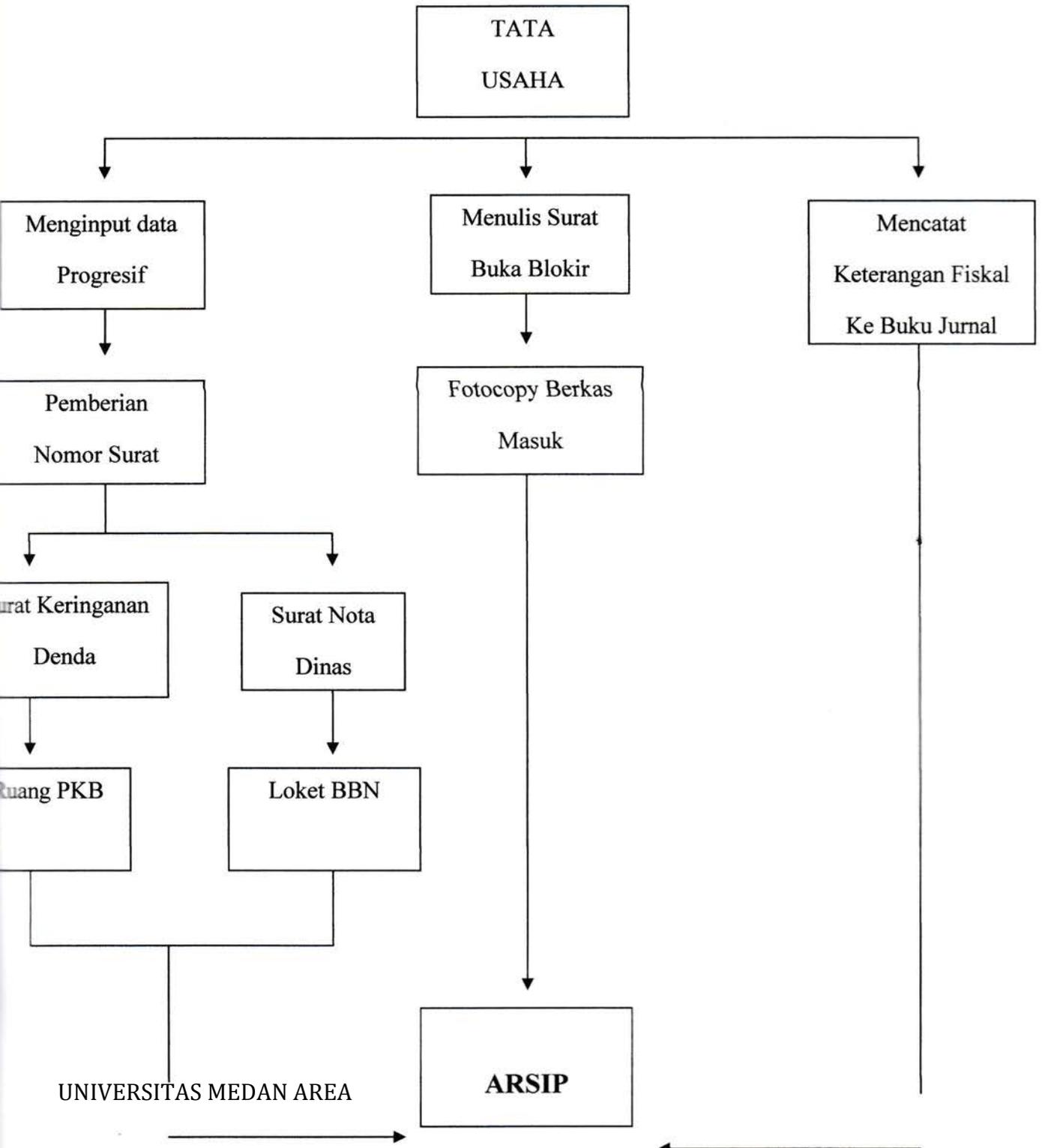
9. UPTD PEMATANG SIANTAR : wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan sebagian Kabupaten Simalungun.
10. UPTD PERDAGANGAN : wilayah kerja sebagian Kabupaten Simalungun.
11. UPTD LIMA PULUH : wilayah kerja Kabupaten Batubara.
12. UPTD KISARAN : wilayah kerja Kabupaten Asahan.
13. UPTD TANJUNG BALAI : wilayah kerja Kota Tanjung Balai.
14. UPTD AEK KANOPAN: wilayah kerja Kabupaten Labuhan Batu Utara.
15. UPTD RANTAU PRAPAT : wilayah kerja Kabupaten Labuhan Batu.
16. UPTD KOTA PINANG : wilayah kerja Kabupaten Labuhan Selatan.
17. UPTD GUNUNG TUA : wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas Utara.
18. UPTD SIBUHUAN : wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas.
19. UPTD PADANG SIDEMPUAN : wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan.
20. UPTD PENYABUNGAN : wilayah kerja sebagian Kabupaten Mandailing Natal.
21. UPTD NATAL : wilayah kerja sebagian Kabupaten Mandailing Natal.
22. UPTD SIBOLGA : wilayah kerja Kota Sibolga dan sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah.
23. UPTD BARUS : wilayah kerja sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah.
24. UPTD TARURUTUNG : wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara.
25. UPTD DOLOK SANGGUL : wilayah kerja Kabupaten Humbang Hasundutan.
26. UPTD BALIGE : wilayah kerja Kabupaten Toba Samosir.
27. UPTD PANGURURAN : wilayah kerja Kabupaten Samosir.
28. UPTD SIDIKALANG : wilayah kerja Kabupaten Dairi.
29. UPTD SALAK : wilayah kerja Kabupaten Pakpak Barat.
30. UPTD KABANJAHE : wilayah kerja Kabupaten Karo.
31. UPTD GUNUNG SITOLI : wilayah kerja Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Nias.
32. UPTD TELUK DALAM : wilayah kerja Kabupaten Nias Dalam.

3.2 Prosedur Kerja

KKL yang dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Medan Utara/Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dibagian Tata Usaha merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Kerja sama yang di dapat dari para pegawai/staff dapat

memberikan pengalaman yang baik bagi penulis bahwa dalam sebuah perusahaan itu lebih membutuhkan sebuah kerja sama yang baik untuk mensukseskan sebuah kegiatan kerja.

Gambar Alur Pekerjaan Tata Usaha



3.3 Struktur Organisasi

A. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Struktur organisasi merupakan sebuah sistem hubungan antara para anggota organisasi. Struktur organisasi diperlukan perusahaan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggungjawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu perusahaan diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan perusahaan tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi perusahaan.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa.
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan.
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa.
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi.
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa.

c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah
- b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Retribusi Daerah
- c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis

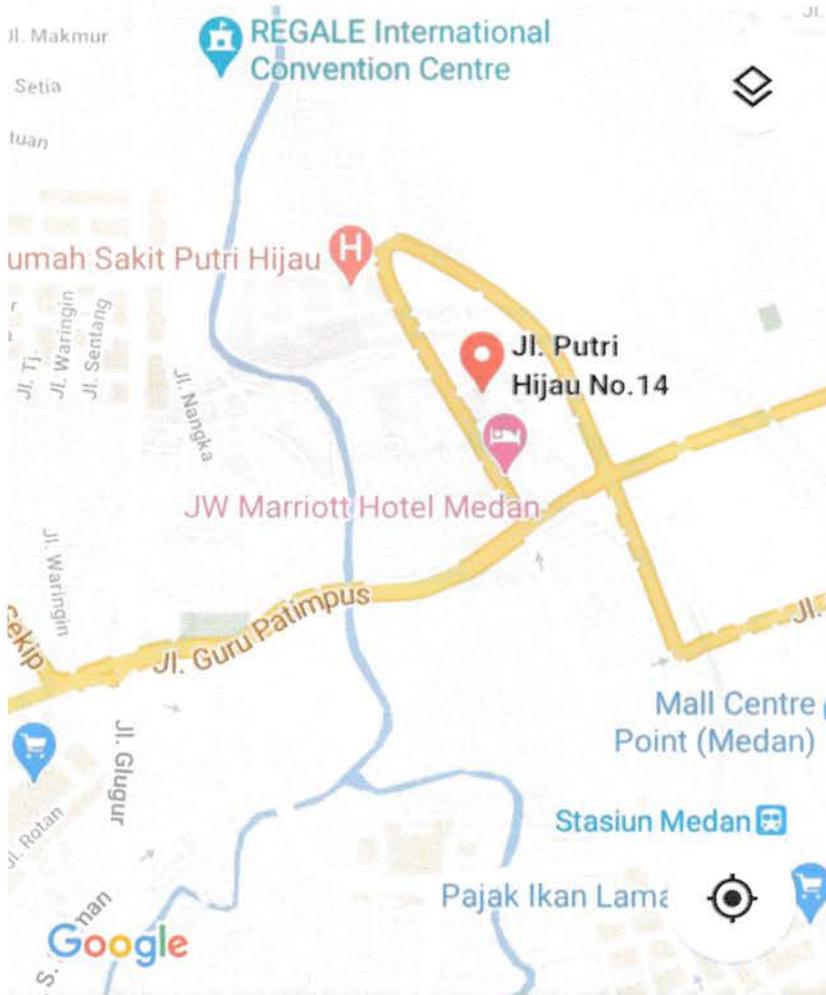
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Suatu perusahaan terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal melalui saluran tunggal.

**Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(SAMSAT) Putri Hijau Medan**



3.4 Lokasi Kuliah Kerja Lapangan



Alamat lokasi : Jl. Putri Hijau No. 14, Medan, Sumatera Utara 20133
Indonesia

Nomor Telepon : - belum tersedia

Kode Pos : 20133

Kategori : Polisi

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kinerja Pegawai Di Tengah Pandemi Covid-19

Mulai 15 Juni 2020, Layanan Perpajakan Tatap Muka di Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia dibuka kembali.

Namun, tidak semua layanan perpajakan dapat dilakukan dengan tatap muka. Wajib Pajak juga diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan saat datang ke Kantor Pajak.

Layanan yang saat ini sudah tersedia secara daring (seperti: pendaftaran NPWP, laporan SPT bagi Wajib Pajak yang sudah wajib menggunakan e-filing, permintaan Surat Keterangan Fiskal, validasi pembayaran PPh Final atas PHTB, aktivasi EFIN dan permintaan kembali EFIN karena lupa, serta layanan *VAT Refund di bandara*) tidak diberikan melalui tatap muka.

Bagi Wajib Pajak yang menghendaki layanan konsultasi perpajakan, diharuskan untuk membuat janji tatap muka terlebih dahulu melalui saluran komunikasi kantor pelayanan terkait.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan adalah kendaraan bermotor semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di udara.

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditentukan sebagai berikut:

1. untuk kepemilikan kendaraan pertama, sebesar 2% (dua persen).
2. untuk kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
3. untuk kendaraan bermotor yang ketiga, sebesar 3% (tiga persen).
4. untuk kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
5. untuk kepemilikan kendaraan sebesar 4% (empat persen).
6. untuk kepemilikan kendaraan sebesar 4,5% (empat koma lima persen).
7. untuk kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen).
8. untuk kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
9. untuk kepemilikan kendaraan dilindungi sebesar 6% (enam persen).
10. untuk kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen).
11. untuk kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen).
12. untuk kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
13. untuk kendaraan bermotor yang ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen).
14. untuk kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen).
15. untuk kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen).
16. untuk kepemilikan kendaraan sebanyak 9,5% (Sembilan koma lima persen).
17. untuk kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Kepemilikan kendaraan oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen).

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk ASN:

1. TNI / POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen).
2. Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen).
3. lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen).
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditentukan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara merevisi target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun ini karena terdampak pandemi Covid-19. Kepala Bidang PKB dan BBNKB Sumut, Syaiful Bahri mengatakan Pemprov memasang target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masing-masing sebesar Rp2,07 triliun dan Rp1,54 triliun pada 2020. Namun target diperkirakan akan sulit tercapai di tengah pandemi Covid-19.

Meluasnya penyebaran virus corona membuat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) harus menutup beberapa sentra pelayanan dan menjadwalkan ulang waktu pelayanan, yang awalnya beroperasi pada pukul 08:00-16:00 WIB menjadi pukul 09:00-14:00 WIB. Langkah tersebut guna mencegah penularan virus corona. Selain itu, pihaknya membebaskan denda pembayaran PKB dan BBNKB pada periode 26 Maret-29 Mei untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Target penerimaan PKB dan BBNKB dari semula diprediksi bisa 100% hanya menjadi 85%, atau terkoreksi 15%. Jadi ada perubahan terkait dengan target penerimaan karena terpengaruh wabah ini."

Syaiful mengatakan dampak wabah virus corona terhadap realisasi penerimaan pajak mulai terasa sejak awal Maret dan berlanjut hingga Mei. Dia memerinci realisasi penerimaan PKB dari rata-rata 8,74% per bulan mulai turun menjadi 8,19% pada Maret, berlanjut pada April 5,63%, dan Mei 3,58%. Begitu pula, realisasi penerimaan BBNKB dari semula 8,20% pada Februari 2020 menjadi 7,41% pada Maret, berlanjut pada April 5,94% dan Mei 2,54%.

Melihat koreksi yang terjadi akibat pandemi Covid-19, menurutnya akan sangat berat untuk merealisasikan target yang dipasang awal tahun. Oleh karena itu, BPPRD merevisi target penerimaan PKB dan BBNKB masing-masing menjadi Rp1,76 triliun dan Rp1,31 triliun.

"Karena kondisi yang tidak kita prediksi ini, berdasarkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka Mei ini kita harus revisi kembali target penerimaan PKB dan BBNKB." imbuhnya. Hingga 17 Mei 2020, realisasi PKB dan BBNKB di Provinsi Sumatra Utara masing-masing senilai Rp 720,89 miliar dan Rp479,26 miliar. Realisasi itu masing-masing setara dengan 34,75% dan 31,10% dari target yang dipasang pada awal tahun.

4.2 Jenis-jenis Pelaksanaan KKL

1. Mendengarkan pengarahan dari Kepala Bagian Umum.

Pengarahan disampaikan oleh Bapak H. Ibrahim Ichsan Harahap, S.Sos selaku Kepala Bagian Umum Tata Usaha. Pengarahan yang disampaikan mengenai program-program kerja yang ada dibagian umum (Tata Usaha). Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama selama 1 hari.

2. Memberi Nomor Surat-surat Keluar.

Penulis diberi tugas untuk menomori setiap surat-surat keluar agar tersistematis sesuai dengan kode-kode setiap surat dan berurut untuk setiap surat yang keluar. Misalnya, untuk surat keluar untuk masalah-masalah umum seperti permohonan User ID, penyampaian laporan sesus/penelusuran KB-TMDU, penghapusan data piutang, permohonan perbaikan data diberi kode nomor 973, untuk kepegawaian diberi kode 800 yang berisi tentang penggunaan aplikasi SKP Online bagi PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan untuk surat keluar yang diberi kode 700 yang bersifat penting seperti tindak lanjut hasil pemeriksaan regular inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas pendapatan dan hasil notulen rapat PAD triwulan I TA 2018. Contoh surat keluar yang ditunjukkan kepada salah satu pegawai izin petugas mengenai konfirmasi kekurangan/kelengkapan berkas permohonannya maka akan dinomori sebagai berikut : “973/200/UPT/PPD/MU/2020”.

Keterangan : “973” ialah kode surat (tentang masalah umum), “200” ialah urutan surat yang telah dinomori di buku penomoran, “UPT” merupakan nama instansi surat tersebut dikeluarkan, dan “MU” lokasi nama instansi tersebut dikeluarkan, dan “2020” merupakan tahun surat tersebut dikeluarkan. Tugas ini merupakan kegiatan rutin setiap harinya selama melaksanakan KKL.

3. Mencatat Dan Mengarsipkan Surat Permohonan Pembukuan Blokir Ke Dokumen.

Penulis diberi tugas untuk mencatatkan surat pembukuan/permohonan blokir dimana surat tersebut tidak langsung dicatat, surat ini dicatat sesuai perintah dari pegawai Badan Pengelolaan Pajak Dan Retrebusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara dengan alasan Wajib Pajak menyatakan adanya pemblokiran kendaraan bermotornya atau tidak sengaja diblokir Wajib Pajak lain dengan nama yang sama. Dengan ini surat diblokir dapat dicatat penulis sesuai perintah. Contoh surat pemblokiran ini berisi pernyataan dengan dilengkapi data-data diri dan data kendaraan bermotor, pernyataan itu benar pemilik secara pribadi mengakui dengan menyatakan bahwasanya tidak pernah melakukan pemblokiran pada SAMSAT Medan Utara. Dengan demikian surat permohonan dibuat dengan sebenarnya, surat permohonan pemblokiran ini disertai dengan materai, tanda tangan pemilik dan dapat disetujui langsung oleh bagian umum sehingga pemilik kendaraan bermotor dapat dibuka pemblokirannya dan dapat segera membayar pajak kendaraan bermotor. Setelah mencatat surat permohonan pemblokiran tersebut penulis langsung mengarsipkan agar tersusun rapi.

4. Menginput Data Pengantar Perubahan Pokok Denda Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini penulis ditugaskan untuk menginput data pengantar data pokok denda kendaraan bermotor. Dimana data perubahan ini diinput sesuai urutan nomor keterangan data pengantar ini mengenai tentang perubahan denda pokok kendaraan bermotor dengan nilai yang tinggi menjadi rendah. Misalnya denda pokok kendaraan Rp. 211.000 menjadi Rp. 190.000 perubahan sangat kecil penurunannya tidak hanya denda pokok, pengantar perubahan ini juga disertai nominal jumlah pajak kendaraan bermotor serta sanksi administrasinya. Data pengantar perubahan pokok denda kendaraan bermotor ini diinput sesuai dengan tanggal kapan terjadinya perubahannya, karena data ini tidak sedikit jumlahnya. Tugas ini merupakan kegiatan rutin setiap harinya selama melaksanakan KKL.

5. Menginput Data Penghantar Penurunan Progresif Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini penulis ditugaskan untuk menginput data penghantar progresif kendaraan bermotor. Tidak jauh berbeda dengan data penghantar penurunan perubahan pokok denda kendaraan bermotor, disini yang membedakan cara penginputan penulis ditugaskan memasukan jumlah nominal akhir progresifnya sedangkan penurunan pokok denda nominal angka yang dimasukan dari awal sebelum/sesudah dikurangi dendanya. Data ini berisi jumlah kendaraan, misalnya kendaraannya 5 menjadi 1 itu terjadi penurunan progresif tetapi kendaraannya 1 menjadi 3 terjadi kenaikan progresif. Penulis harus sangat teliti dan memasukan jumlah kendaraan yang terjadi progresif selalu penulis memasukan jumlah keseluruhan progresif, denda pokok, sanksi administrasinya.

Tugas ini merupakan kegiatan rutin setiap harinya selama melaksanakan KKL.

4.3 Kegiatan Selama KKL

A. Kendala Kerja dan Pemecahannya

1) Kendala yang dihadapi

- a) Pada awal pelaksanaan praktek kerja penulis merasa asing dan belum terbiasa dengan lingkungan dan masih canggung dengan jenis pekerjaan yang ada.
- b) Penulis kurang memahami dan mengetahui jenis pekerjaan apa saja yang ada diruangan tersebut.
- c) Proses penyelesaian merakap pemakaian dan peralatan alat tulis kantor (ATK) yang masih membutuhkan proses yang panjang dan belum dipermudah penyelesaiannya.

2) Upaya Pemecahan Masalah

- a) Berusaha menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja yang baru dan kepada pegawai dan staff yang ada dikantor UPT dispendasu Medan Utara khususnya dibagian TU (Tata Usaha) untuk tidak malu bertanya jika ada pekerjaan yang tidak dimengerti.

- b) Berusaha memahami dan mengerti terhadap setiap pekerjaan yang diberikan dan mencari tau apabila ada jenis pekerjaan yang belum kita ketahui di dalam ruangan TU tersebut.
- c) Berusaha memahami situasi dan kondisi perusahaan dengan tidak mengeluh dan tetap menjalankan tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin.
- d) Berusaha melaksanakan pekerjaan dengan teliti agar tidak salah dalam melakukan setiap pekerjaan dan mengetik ulang apabila pekerjaan sudah selesai.

4.4 Analisis Pelaksanaan Kegiatan KKL

1. Hasil kegiatan

Selama 1 Bulan melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) terhitung mulai tanggal 13 Juli-12 Agustus 2020 banyak kegiatan yang penulis lakukan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah Medan Utara Sumatera Utara, baik itu kegiatan yang sifatnya mendukung terhadap penyusunan laporan KKL, maupun kegiatan yang menambah pengalaman dan wawasan penulis.

Semua kegiatan penulis lakukan berdasarkan instruksi dari pembimbing instansi KKL. Namun ada pula beberapa kegiatan yang dilakukan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi dimana penulis dibutuhkan untuk membantu Bapak dan Ibu pegawai memfotocopy bahan-bahan pekerjaan, membantu mengarsipkan surat-surat sampai dengan hal-hal yang berhubungan laporan KKL penulis yaitu mengenai **KINERJA PEGAWAI DIBAGIAN TATA USAHA DITENGAH PANDEMI COVID-19.**

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bab ini merupakan Bab terakhir dari laporan KKL, untuk itu penulis menyimpulkan laporan yang telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, selanjutnya akan memberi kesimpulan dan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi program studi Ilmu Sosial Politik dan pihak UPT SAMSAT Medan Utara.

Dari sebuah pengalaman yang telah dilakukan penulis selama melaksanakan KKL di kantor UPT SAMSAT Medan Utara banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berguna diperoleh penulis. Pengalaman-pengalaman tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya :

1. KKL mengenalkan penulis bagaimana berinteraksi dalam bekerja dan mengenal dunia kerja yang sesungguhnya.
2. mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga bagaimana cara melayani wajib pajak dengan baik.
3. pentingnya komunikasi antara karyawan dalam mengerjakan tugas, untuk mempermudah dalam mengerjakannya, sehingga penulis dapat percaya diri dan tidak merasa khawatir yang di timbulkan dalam kesalahan bekerja.
4. selama melakukan kegiatan KKL di kantor UPT SAMSAT Medan Utara penulis dapat mengetahui bagaimana sistem kerja dibagian Tata Usaha UPT SAMSAT Medan Utara.
5. penulis dapat mengetahui bagaimana membuat surat permohonan keringanan denda PKB, membuat nomor surat pada surat keluar, dan membantu merekap absen pegawai/outsourcing.

Dalam hal ini di unit pelaksanaan teknis (UPT) Medan Utara/Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki sistem kerja yang baik. Apalagi dengan didukungnya penggunaan sistem yang sudah canggih mengikuti perkembangan zaman sekarang sehingga mempermudah dalam melakukan pekerjaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Prosedur Perusahaan di unit pelaksanaan teknis (UPT) Medan Utara/Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara juga baik, dalam hal ini kantor tidak mempersulit prosedur

terutama bagi wajib pajak dalam mengurus dalam sesuatu yang berhubungan dengan pepajakan.

Data atau arsip di unit pelaksanaan teknis (UPT) Medan Utara/Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak semua menggunakan data computer melainkan dalam hal ini masi ada sebagian menggunakan data manual.

5.2 Saran

Setelah penulis menganalisa dan mengevaluasi yang diperoleh dari kantor UPT SAMSAT Medan Utara terutama pada bagian Tata Usaha maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi kantor UPT SAMSAT Medan Utara dan bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dalam menerapkan kebijakan guna perkembangan dan kemajuan kedepannya, serta untuk lebih meningkatkan mutu mahasiswa dan mempelancar proses kegiatan KKL, yaitu :

- 1) UPT SAMSAT Medan Utara sebagai Perusahaan PEMROVSU yang bergerak di bidang pelayanan jasa PKB/BBN-WNKB untuk masyarakat umum dalam mengembangkan tugas dan wewenang hendaknya dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak dan terus meningkatkan citra perusahaan dengan semakin memperbaiki kinerja perusahaan kedepannya.
- 2) Sebaiknya sebelum waktu pelaksanaan KKL pada mahasiswanya, agar mahasiswa diberikan pengarahan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi nama Universitas mahasiswa KKL yang terkait.
- 3) Agar mahasiswa lebih disiplin dan memberikan kemampuan terbaik untuk dapat membantu kegiatan instansi ditempat mahasiswa KKL.
- 4) Bagi unit teknis (UPT) Medan Utara/Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan meningkatkan kinerja dengan cara menambah anggota dalam membantu pelayanan bagi para wajib pajak agar memudahkan dalam mengarahkan atas urusan pembayaran pajak. Sehingga pelayanan dalam unit pelaksanaan teknis (UPT) Medan Utara/Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik sesuai dengan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

<http://bpprd.sumutprov.go.id/website/about-us/uptd>

<https://bali.kemenag.go.id/klungkung/berita/15616/evaluasi-kinerja-pegawai-di-masa-pandemi-covid-19>

<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/teori-kinerja-pegawai-15>



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20221
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A. ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 453 /FIS.0/05.1/VII/2020
Lampiran : -
Hal : Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Medan, 10 July 2020

Yth. Bapak/Ibu Samsat Medan Utara
Di –
Tempat

Dengan Hormat, Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa/i kami dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA MAHASISWA	NPM
1	Susi Florida Br Sebayang	178510014
2	Fery Afriandi Sihite	178510032
3	Muhammad Taufiq	178510057

Untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dimaksud guna menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa/i, dan KKL dilaksanakan pada tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2020.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan KKL pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN - (20111)

Medan, 12 Agustus 2020

Nomor : 973/50\ /UPT/PPD/MU/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Kuliah
Kerja Lapangan (KKL)

Kepada Yth :

Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universitas Medan Area
Di_
Medan

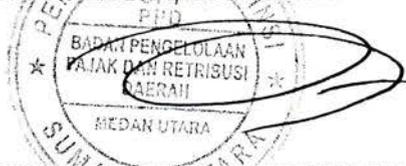
Sehubungan dengan Surat dari Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Nomor: 453/FIS.0/05.2/VII/2020 pada tanggal 12 Agustus 2020 atas Selesai Melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), maka dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa atas nama berikut ini :

Nama : Muhammad Taufiq
NPM : 178510057
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Studi : S1

Sehubungan dengan hal tersebut Kami memberikan Izin Selesai Melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Demikian disampaikan, dan diucapkan terima kasih.

A.n ~~KEPALA~~ UPT PPD BPPRD-SU
MEDAN UTARA
KASUBBAG TATA USAHA



H. IBRAHIM ICHSAN HARAHAP, S.Sos
PENATA TK.I
NIP. 196711161990031004

UNIVERSITAS MEDAN AREA